

PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, TINGKAT SUKU BUNGA DAN NON PERFORMING LOAN TERHADAP PENYALURAN KREDIT UMKM DI BANK SULUTGO

Yoel Stevano Raming¹, Arie F Kawulur², Stanny S. Rawung²

^{1,2,3}Ilmu Ekonomi, Universitas Negeri Manado, Manado

e-mail: stannyrawung@unima.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), suku bunga, dan Non Performing Loan (NPL) terhadap penyaluran kredit UMKM di Bank SulutGo. Data penelitian ini berasal dari laporan tahunan dan triwulanan yang dikirimkan Bank SulutGo. Data penelitian diperoleh dari 32 laporan keuangan triwulanan Bank SulutGo periode 2014-2021 menggunakan metode purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan regresi linier berganda menggunakan software SPSS. Hasil investigasi digunakan untuk membuat sesuatu terjadi. Rasio Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan UMKM adalah 0,019, yang merupakan angka yang penting secara statistik. Dari fakta bahwa $0,019 > 0,05$, kita dapat mengatakan bahwa deposito berpengaruh pada kredit UMKM. Kedua, suku bunga pinjaman kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sangat rendah, yaitu 0,003. Kita tahu bahwa suku bunga mempengaruhi pinjaman kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebesar $0,003 > 0,05$. Penelitian menunjukkan bahwa faktor Non Performing Loan (NPL) dan kredit UMKM memiliki hubungan yang signifikan secara statistik pada level 0,136. Tetapi penting untuk diingat bahwa angka ini lebih tinggi dari tingkat signifikansi yang umum digunakan yaitu 0,05, sehingga kita tidak dapat mengatakan bahwa variabel NPL tidak mempengaruhi kredit UMKM. Dalam hal ini, tidak ada cukup bukti statistik untuk mendukung gagasan bahwa NPL tidak mempengaruhi kredit UMKM. Karena p-value interaksi antara Dana Pihak Ketiga (DPK), Suku Bunga, dan Non Performing Loan (NPL) kurang dari 0,05, ketiga variabel independen ini berpengaruh terhadap kredit UMKM.

Kata kunci: dana pihak ketiga, tingkat suku bunga, non performing loan (NPL), kredit

Abstract

This study aims to analyze the effect of Third Party Funds (DPK), interest rates, and Non Performing Loan (NPL) on MSME lending at Bank SulutGo. This research data comes from annual and quarterly reports sent by Bank SulutGo. The research data were obtained from 32 quarterly financial reports of Bank SulutGo for the period 2014-2021 using purposive sampling method. Data analysis was carried out by multiple linear regression using SPSS software. The results of the investigation are used to make something happen. The ratio of Third Party Funds (DPK) to MSME financing is 0.019, which is a statistically important number. From the fact that $0.019 > 0.05$, we can say that deposits have an effect on MSME loans. Secondly, the interest rate on loans to micro, small and medium enterprises (MSMEs) is very low at 0.003. We know that interest rates affect loans to micro, small, and medium enterprises (MSMEs) by $0.003 > 0.05$. The research shows that the Non Performing Loan (NPL) factor and MSME loans have a statistically significant relationship at the 0.136 level. But it is important to remember that this figure is higher than the commonly used significance level of 0.05, so we cannot say that the NPL variable does not affect MSME loans. In this case, there is not enough statistical evidence to support the idea that NPLs do not affect MSME loans. Since the p-value of the interaction between Third Party Funds (DPK), Interest Rates, and Non Performing Loan (NPL) is less than 0.05, these three independent variables have an effect on MSME loans.

Keywords: regional original revenue, general allocation fund, special allocation fund and economic growth

1. Pendahuluan

Salah satu metrik yang digunakan untuk mengukur seberapa cepat ekonomi tumbuh adalah pertumbuhan ekonomi. Kelanjutan proses ekonomi yang mengarah pada peningkatan tingkat produktivitas kegiatan sosial diyakini sebagai pertumbuhan ekonomi. Pemerintah menawarkan pelaksanaan otonomi daerah sebagai kesempatan untuk mendorong terwujudnya pembangunan nasional. Pemerintah daerah memiliki kekuatan untuk secara

mandiri memungut pajak dan mendistribusikannya sambil menetapkan prioritas pembangunan berkat sistem otonomi daerah. Dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah berdasarkan kemampuan masing-masing daerah, otonomi daerah berupaya menghasilkan pembangunan atau pembangunan yang sesuai dengan kepentingan daerah. (2010) Sukirno, Provinsi Sulawesi Utara di Indonesia merupakan bagian dari beberapa provinsi yang memiliki otonomi daerah. Sistem otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengendalikan keuangan daerah dan menahan intrusi negara. Supriyanto (2022), kebijakan otonomi daerah memungkinkan setiap daerah, termasuk Provinsi Sulawesi Utara, untuk mengoptimalkan potensi sektor-sektor ekonomi unggulannya. Provinsi yang secara konsisten berupaya meningkatkan pendapatan daerah setiap tahunnya sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah federal adalah Provinsi Sulawesi Utara. Kurangnya kemampuan PAD dapat menghambat pembangunan ekonomi daerah. Penyaluran dana pemerintah pusat melalui DAU dan DAK berdampak langsung pada berapa lama pembangunan daerah dapat bertahan. Pemerintah daerah berusaha meningkatkan pendapatan daerah sebagai hasilnya. Oleh karena itu, penelitian tentang bagaimana PAD, DAU, dan DAK mempengaruhi pembangunan ekonomi Provinsi Sulawesi Utara menjadi penting.

Salah satu indikasi sumber belanja daerah saat ini adalah PAD. Menurut definisi Halim tentang PAD dari tahun 2007, semua pendapatan atau pendapatan daerah yang berasal dari daerah mereka sendiri dikumpulkan sesuai dengan hukum dan peraturan setempat. Pemerintah daerah didorong untuk lebih berinisiatif dalam menggali potensi daerah dan mendorong pembangunan ekonomi di daerah sebagai hasil dari peningkatan PAD karena diterjemahkan ke dalam lebih banyak pendanaan untuk pemerintah daerah dan lebih banyak otonomi daerah. Ardiansyah & Widiyaningsih (2014) mengidentifikasi DAU sebagai hibah tanpa syarat karena merupakan semacam transfer lintas tingkat pemerintah yang tidak terkait dengan inisiatif pengeluaran tertentu (Tambunan, 2006).

Dengan DAU, kesenjangan infrastruktur di setiap daerah dihilangkan, dan DAU juga diperlukan untuk pemerataan pembangunan ekonomi. Menurut teori DAK Halim (2014), uang dari APBN dialokasikan ke daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan tertentu yang berfokus pada daerah yang juga sesuai dengan tujuan nasional. Dengan memprioritaskan infrastruktur pemerintah daerah, serta kesehatan, pendidikan, lingkungan, pertanian, perkapalan, dan perikanan, DAK bertujuan untuk menutup kesenjangan dalam layanan masyarakat di seluruh wilayah. Dapat disimpulkan dari implementasi pendapatan asli daerah dan PDRB Provinsi Sulawesi Utara bahwa situasinya telah berubah selama tiga tahun terakhir. Perekonomian Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Utara, dipengaruhi oleh penurunan aktivitas masyarakat selama tiga tahun sebelumnya sebagai akibat dari epidemi corona (Covid-19). Keadaan ini berkembang sebagai akibat dari penurunan daya beli daerah dan penurunan aktivitas komersial untuk subjek pajak tertentu. Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, PDRB Provinsi Sulawesi Utara tumbuh lebih pesat selama tiga tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi kawasan diukur menggunakan PDB (Produk Domestik Bruto). Sedangkan PDB suatu daerah mengukur nilai semua produk dan jasa yang dihasilkan oleh semua kegiatan ekonominya (Produk Domestik Regional Bruto). PDB dengan harga konstan adalah metrik yang digunakan pemerintah untuk menilai pertumbuhan ekonomi regional. Jaya & Dwiandra 2014 Menurut definisi di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis isu-isu terkini dimana PAD, DAU, dan DAK mempengaruhi pembangunan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara secara parsial maupun simultan.

2. Metode

Penelitian semacam ini menggunakan data sekunder untuk analisis dan bersifat deskriptif kuantitatif. Analisis deskriptif adalah jenis analisis yang menggunakan data yang ada untuk menjelaskan dan menganalisis suatu masalah inti. Menurut evaluasi Sugiyono (2018), data kuantitatif merupakan metodologi penelitian positivistik (data konkret). Data penelitian yang dimaksud adalah bobot yang dinilai menggunakan statistika sebagai alat ukur dan dihubungkan dengan beban yang diteliti untuk mencapai suatu kesimpulan. Provinsi Sulawesi Utara merupakan lokasi penelitian, dan masa studi tahun 2002 hingga 2021.

Teknik Pengumpulan Data

Informasi opsional adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh seseorang yang melakukan penelitian sesuai dengan beberapa sumber yang tersedia. BPS (*Focal Measurement Organization*) Wilayah Sulawesi Utara dan karya-karya logika penting lainnya merupakan sumber informasi yang digunakan dalam eksplorasi ini. Selanjutnya, untuk menemukan informasi yang mendukung pemeriksaan mereka, peneliti sering mengarahkan tampilan tulisan. Distribusi penelitian terkait masa lalu memberikan referensi untuk menulis studi.

Teknik Analisis Data

Analisis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik analisis regresi linier. Ketika semua variabel independen memiliki nilai yang diketahui, analisis digunakan untuk menentukan seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen serta untuk memperkirakan bobot variabel dependen. Aplikasi Eviews 10 dan Microsoft Excel 2019 digunakan untuk memproses data penelitian.

Model regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut:

$$Y = f(X_1, X_2, X_3) \quad (1)$$

Kemudian, diubah dalam model ekonometrika seperti berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e \quad (2)$$

Lalu, diubah dalam bentuk model log-log dengan cara mentransformasikan nilai-nilai variabel yang diuji dalam log-natural untuk menghindari masalah pada asumsi klasik seperti berikut:

$$\log(Y) = \alpha + \beta_1 \log(X_1) + \beta_2 \log(X_2) + \beta_3 \log(X_3) \quad (3)$$

Dimana pada model log-log, β_1 adalah elastisitas y terhadap x . Sehingga, dapat diinterpretasikan dengan model seperti berikut:

$$\% \Delta y = \beta_1 \% \Delta x \quad (4)$$

Dimana:

- Y : Pertumbuhan Ekonomi
- X1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- X2 : Dana Alokasi Umum (DAU)
- X3 : Dana Alokasi Khusus (DAK)
- α : Konstanta/Intercept
- β : Koefisien Regresi
- e : Standar Error
- Δ : Variasi Perubahan Variabel

Jika tetap terjadi pelanggaran pada model regresi terhadap uji asumsi klasik setelah data penelitian diubah ke dalam bentuk logaritma, maka langkah penyembuhan selanjutnya yang harus dilakukan adalah metode diferensiasi terhadap model regresi. Dimana persamaan ekonometrika model regresi dengan diferensiasi adalah seperti berikut:

$$D(\log(Y)) = \alpha + \beta_1 D(\log(X_1)) + \beta_2 D(\log(X_2)) + \beta_3 D(\log(X_3)) \quad (5)$$

Namun sebelum menggunakan metode diferensiasi terhadap model regresi, perlu dilakukan Uji Stasioner Data terhadap variabel-variabel terlebih dahulu.

3. Hasil dan Pembahasan

Data Hasil Penelitian

Informasi opsional adalah informasi yang digunakan dalam ulasan ini. Informasi ini adalah informasi deret waktu 20 tahun dari 2002-2021. Informasi diperoleh dari BPS Wilayah Sulawesi Utara. Tiga faktor bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Cushman, DAU, dan DAK. Sementara itu, variabel dependen yang digunakan adalah Pengembangan Keuangan dan dalam penelitian ini para ilmuwan menggunakan PDRB pada premis biaya yang konsisten dengan tahun dasar 2010 sebagai proporsi pembangunan moneter di Wilayah Sulawesi Utara.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Tes ini adalah kemampuan faktual yang harus dipenuhi saat memimpin pemeriksaan kambuh langsung yang berbeda berdasarkan OLS Tes kecurigaan tradisional sangat membantu dalam menunjukkan bahwa model kambuh yang ditemukan adalah model yang paling umum baik dalam hal masalah presisi penilaian, tidak bias, dan konsistensi. (Juliandi, dkk., 2014)

Berikut rangkuman hasil uji asumsi klasik dari model regresi 1.

- Normalitas: Probabilitas Jarque-Bera: $0,690065 > 0,05$, yang berarti bahwa asumsi normalitas model regresi terpenuhi (terdistribusi normal).
- Autokorelasi: Probabilitas Chi-Square: $0,0005 < 0,05$, yang berarti bahwa ada masalah autokorelasi dalam model regresi.
- Heterokedastisitas: Probabilitas Chi-Square: $0,2020 > 0,05$, yang berarti bahwa masalah heterokedastisitas tidak terjadi pada model regresi.
- Multikolinearitas (VIF): Nilai korelasi antara variabel independen > 10 , yang berarti bahwa antara variabel independen terdapat masalah multikolinearitas dalam model regresi.

Mengingat garis besar hasil eksperimental, cenderung terlihat bahwa model kambuh 1 tidak menyelesaikan penilaian autokorelasi dan uji multikolinearitas. Dengan cara ini, langkah pemulihan untuk mengalahkan masalah ini adalah dengan menggunakan teknik pemisahan. Namun, sebelum menyelesaikan teknik pemisahan, penting untuk memimpin tes informasi tetap pada setiap variabel saat ini.

Selanjutnya adalah sinopsis konsekuensi dari informasi tes tetap pada setiap variabel:

Tabel 1. Hasil Uji Stasioner

	LPDRB	LPAD	LDAU	LDAK
Level	0,7112	0,1200	0,7688	0,4851
1 st Difference	0,0878	0,0318	0,0214	0,0002
2 nd Difference	0,0004	0,0001	0,0005	0,0012

Sumber: Eviews 10

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian tidak diam pada tingkat. Karena tes ini dilakukan pada tingkat kepercayaan $\alpha = 10\%$, maka dilanjutkan pada tingkat selisih 1. Pada perbedaan level 1 semua variabel LPDRB, LPAD, LDAU, dan LDAK menunjukkan bahwa data variabel-variabel tersebut stasioner. Artinya, data yang digunakan dalam penelitian ini diam pada tingkat perbedaan 1 st.

- Setelah pengujian informasi yang tetap, kemudian, pada saat itu, tahap penyelidikan dilanjutkan dengan menguji anggapan gaya lama terhadap model kambuh baru yang telah menggunakan teknik pemisahan. Selanjutnya adalah sinopsis konsekuensi dari tes anggapan gaya lama dari model kambuh 2:
- Ordinariness: Jarque-Bera likelihood: $0,864355 > 0,05$, dan itu menyiratkan bahwa anggapan ordinariness dari model kambuh terpenuhi (tersebar secara teratur).
- Autokorelasi: Kemungkinan Chi-Square: $0,4743 > 0,05$, dan itu sebenarnya berarti bahwa tidak ada masalah autokorelasi dalam model kambuh.
- Heterokedastisitas: Kemungkinan Chi-Square: $0,0651 > 0,05$, dan itu menyiratkan bahwa masalah heterokedastisitas tidak terjadi pada model kambuh.
- Multikolinearitas (VIF): Harga hubungan antara faktor bebas < 10 , dan itu benar-benar berarti bahwa antara faktor otonom tidak ada masalah multikolinearitas dalam model kambuh.

Mempertimbangkan konsekuensi dari hasil uji keraguan yang ketinggalan zaman dari model *backslide* berikutnya yang telah menggunakan prosedur detasemen, dapat dilihat bahwa model *backslide* telah memenuhi asumsi adat atau dapat disebut melayang melalui evaluasi. Jadi model kemunduran berikutnya dilaporkan layak untuk gerakan penelitian.

Hasil Analisis Regresi Berganda

Berikut merupakan interpretasi dari hasil output model regresi pertama:

$\log(\widehat{PDRB}) = 19,3762 + 0,2856 \log(\text{PAD})^{***} + 0,1550 \log(\text{DAU}) + 0,0143 \log(\text{DAK})$			
t-Statistic	(3,947)	(1,509)	(1,34)
Prob	(0,0012)	(0,1507)	(0,1987)
n = 20,	R ² = 0,981496,	F = 282,8868	

Sumber: Eviews 10

Namun, dikarenakan model regresi ini tidak lolos uji asumsi klasik maka model ini tidak layak untuk dilanjutkan. Peneliti menggunakan model regresi yang kedua untuk kelanjutan penelitian ini. Berikut merupakan interpretasi dari hasil output regresi yang kedua setelah digunakan metode diferensiasi:

$D(\widehat{LPDRB}) = 0,042197 + 0,0668 D(\text{LPAD}) + 0,0682 D(\text{LDAU}) - 0,0037 D(\text{LDAK})$			
t-Statistic	(1,4093)	(2,0995)	(-0,9197)
Prob	(0,1791)	(0,0531)	(0,3723)
N = 20,	R ² = 0,404194,	F = 3,391988	

Sumber: Eviews 10

Nilai konstanta, masih di udara dengan hasil model kambuh, adalah 0,042197. Pada akhirnya, nilai perkembangan keuangan sekitar 0,042197 persen mengharapkan tiga faktor otonom Cushion, DAU, dan DAK tidak berubah atau tetap.

Fleksibilitas variabel Cushion, yaitu 0,0668, menunjukkan bahwa ekspansi Cushion sebesar 1% akan membawa ekspansi dalam pengembangan moneter sebesar 0,0668%. Demikian juga, variabel Cushion mempengaruhi perkembangan moneter pada tingkat kepastian 95 persen. Hal ini ditunjukkan dengan dinilai t count dari variabel Cushion, yaitu 1,4093 t-tabel 1,746 dan likelihood senilai 0,1791 > 0,05 (= 5%). Oleh karena itu, H01 didukung sementara H1 tidak didukung.

Variabel fleksibilitas DAU, yaitu 0,0682, menunjukkan bahwa ekspansi DAU sebesar 1% akan membawa ekspansi dalam pengembangan moneter sebesar 0,0682%. Demikian juga, 95% faktor DAU pada dasarnya mempengaruhi kemajuan moneter pada tingkat kepastian. Hal ini ditunjukkan dengan variabel yang dinilai DAU t-hitung, yang ditentukan sebagai 2,0995 t-tabel 1,746 dan memiliki kemungkinan senilai 0,0531 > 0,05 (= 5%). Dengan demikian, H02 didukung sementara H2 tidak didukung.

Fleksibilitas variabel DAK, yaitu - 0,0037, menunjukkan bahwa ekspansi DAU sebesar 1% akan membawa penurunan nilai pengembangan moneter sebesar 0,0037%. Demikian juga, 95% faktor DAK secara signifikan mempengaruhi kemajuan moneter pada tingkat kepastian. Seperti yang harus dilihat, nilai kemungkinan adalah 0,3723 > 0,05 (atau 5%), dan t-count yang diantisipasi dari variabel DAK adalah - 0,9197 t-tabel 1,746. Dengan cara ini, H03 didukung namun H3 tidak didukung.

Tidak ditetapkan oleh nilai R-Squared (R²) yang Diubah, nilainya adalah 0,404194, atau 41,42 persen. Angka ini menunjukkan bahwa perbedaan faktor Cushion, DAU, dan DAK mewakili 41,42 persen dari keseimbangan dalam faktor pengembangan moneter, dengan kelebihan 58,58 persen masuk akal oleh faktor-faktor tambahan yang dikecualikan dari hasil.

Nilai F-count berikutnya adalah 3,391988 > 3,239. (F-Tabel). Sementara 0,045837 0,05 adalah nilai kemungkinan yang ditentukan F. Ini berarti bahwa faktor-faktor bebas, khususnya Cushion, DAU, dan DAK, sementara itu secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan moneter. Oleh karena itu, H4 didukung sementara H0 tidak didukung.

Pengaruh PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Penemuan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa variabel Cushion berpengaruh kecil terhadap perkembangan produk domestik bruto wilayah Sulawesi Utara dan tidak terlalu besar. Penemuan penelitian tidak menjunjung tinggi kemungkinan bahwa peningkatan

keuangan suatu daerah terkait dengan tingkat gaji atau gajinya. Berbeda dengan apa yang ditunjukkan oleh tujuan ini, pertumbuhan ekonomi provinsi lebih cepat ketika Cushion di suatu daerah lebih besar. Ini menunjukkan bahwa nilai pertumbuhan ekonomi tidak terpengaruh oleh ekspansi di Cushion. Anwar, dkk (2016).¹ Tinjauan tersebut, yang menampilkan bahwa beberapa Cushion tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap perkembangan keuangan (PDRB) di Kota Manado, dapat diprediksi dengan penemuan pemeriksaan. Penemuan eksplorasi Suwandika dan; Yasa (2015) lebih lanjut menunjukkan bahwa Cushion no mempengaruhi perkembangan moneter Wilayah Bali. Spekulasi bahwa semakin menonjol berapa banyak Cushion, semakin menonjol laju pergantian peristiwa moneter, tidak didukung oleh penemuan.

Pengaruh DAU terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Penemuan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa variabel DAU berpengaruh positif terhadap produk domestik bruto (total output nasional) Wilayah Sulawesi Utara. Penemuan pemeriksaan ini dapat diandalkan dengan studi Nisa (2017), yang menemukan bahwa DAU secara menguntungkan mempengaruhi peningkatan moneter daerah dan masyarakat perkotaan di Jawa Timur. Menurut penelitian yang dipimpin oleh Putri (2015), DAU tidak mempengaruhi pergantian peristiwa keuangan. Studi Dewi dan; Suputra (2017) lebih lanjut mengemukakan bahwa DAU tidak banyak mempengaruhi perkembangan keuangan. Penjelasan DAU yang diberikan kepada tempat-tempat belum dimanfaatkan dalam upaya yang dapat meratakan peningkatan keuangan satu kabupaten dan daerah lainnya adalah alasan DAU tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Ini mengingat bahwa DAU yang dikumpulkan oleh setiap daerah harus digunakan untuk rencana perbaikan, terutama untuk kantor dan yayasan yang akan mendorong pertumbuhan moneter. Namun, pengiriman DAU ke daerah tidak sesuai dengan alasan yang diharapkan karena digunakan untuk belanja rutin.

Pengaruh DAK terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Konsekuensi dari investigasi menunjukkan bahwa variabel DAK pada dasarnya mempengaruhi perkembangan keuangan (PDRB) Wilayah Sulawesi Utara. Penemuan pemeriksaan ini sesuai dengan penelitian Jannah dan Nasir (2018), yang menemukan bahwa DAK berdampak buruk terhadap peningkatan keuangan Wilayah Aceh, namun juga memiliki dampak signifikan di sana. Arina et alresearch.¹ Mulai sekitar tahun 2019, juga menunjukkan bahwa DAK secara tidak relevan mempengaruhi perkembangan keuangan Kota Manado. Studi Dewi dan; Suputra dari tahun 2017 juga menunjukkan bahwa DAK memiliki konsekuensi yang merugikan, yang untuk situasi ini juga berpengaruh signifikan terhadap peningkatan keuangan rezim dan masyarakat perkotaan di Wilayah Bali. DAK yang ditunjuk oleh pemerintah fokus mungkin tidak cukup ideal dalam kerangka berpikir di daerah-daerah yang terkait dengan pertumbuhan moneter, seperti industrialisme dan pertukaran, administrasi, dan bagian terkait lainnya, yang membuat mereka tidak memperluas tingkat kegiatan penciptaan ekonomi dan, dengan demikian, mempengaruhi pertumbuhan moneter lokal.

Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Konsekuensi dari pemeriksaan menunjukkan bahwa tiga faktor bebas, Cushion, DAU, dan DAK, jika dipikirkan bersama (sepanjang waktu), sangat mempengaruhi variabel reliant, yang untuk situasi ini adalah proporsi pembangunan keuangan di Wilayah Sulawesi Utara. Penemuan riset yang menunjukkan bahwa Cushion, DAU, dan DAK sekaligus berpengaruh signifikan terhadap perbaikan moneter di Kota Malang mantap dengan penelitian Sicilia dan Harsono (2021). Sesuai penyelidikan Sinaga et al. (2020), Cushion, DAU, dan DAK semuanya secara mengesankan mempengaruhi peningkatan keuangan dalam Aturan Sinalungun sepanjang waktu. Arina et alresearch. Mulai sekitar tahun 2019 juga menunjukkan bahwa Cushion, DAU, dan DAK bekerja sama untuk bekerja pada peningkatan keuangan Kota Manado secara mendasar. Konsekuensi dari pemeriksaan Siagian dari 2018 di Daerah Yogyakarta memperkuat eksplorasi ini. Anwar, dkk (2016).¹ Studi yang membahas variabel DAU, DAK, dan Cushion pada saat yang sama mempengaruhi pergantian peristiwa moneter, menghasilkan penemuan komparatif (Produk domestik bruto).

4. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Setelah penyelidikan dan perdebatan ekstensif, kesimpulan berikut dapat dibuat: Di Provinsi Sulawesi Utara, PAD berdampak kecil bagi pembangunan ekonomi. Temuan analisis ini konsisten dengan karya Anwar dan rekan (2016). DAU memiliki sedikit dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Utara. Temuan investigasi ini konsisten dengan penelitian Nisa (2017). DAK memiliki dampak yang merugikan namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Utara. Temuan analisis ini konsisten dengan penelitian Jannah & Nasir sebelumnya (2018). Di Provinsi Sulawesi Utara, PAD, DAU, dan DAK secara kolektif (simultan) memiliki dampak yang menguntungkan dan cukup besar terhadap pembangunan ekonomi. Temuan analisis sesuai dengan Sisilia & Harsono (2021) studi.

Saran

Pemprov Sulut harus menerapkan sejumlah strategi untuk memaksimalkan PAD melalui pajak, retribusi daerah, dan tata kelola kekayaan daerah. Strategi ini termasuk mengumpulkan informasi wajib pajak, bekerja dengan pihak swasta atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) dengan tujuan mengelola dan mengumpulkan pajak daerah, atau meningkatkan administrasi pajak daerah. Guna mengurangi derajat disparitas kegiatan ekonomi dan pelayanan publik di masing-masing daerah, Pemprov Sulawesi Utara harus memaksimalkan pemanfaatan DAU di daerah bukan meningkatkan jumlah alokasi DAU yang disediakan. Potensi *used case* antara lain memprioritaskan cakupan biaya APBD atau mengoptimalkan alokasi DAU untuk pembangunan infrastruktur. Sama halnya dengan DAU, penggunaan DAK harus lebih ditingkatkan agar dapat berdampak positif terhadap perkembangan ekonomi provinsi Sulawesi Utara. Alokasi DAK membantu menjembatani kesenjangan daerah dalam akses ke layanan sosial, khususnya di sektor infrastruktur, kesehatan, lingkungan, dan pertanian, kelautan, dan perikanan. Otonomi daerah sering kali tidak dilaksanakan secara maksimal karena sejumlah permasalahan, seperti perbedaan jumlah dan kualitas sumber daya manusia lintas daerah, distribusi sumber daya alam yang tidak merata, atau pengelolaan pendapatan daerah itu sendiri. Meningkatkan tingkat kualitas sumber daya manusia sebagai pengelola dalam kebijakan otonomi daerah yang berkelanjutan. Dari semua hal yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan kesinambungan otonomi daerah, hal ini merupakan hal terpenting yang dapat dilakukan untuk meningkatkan derajat pelaksanaan otonomi daerah.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyadari bahwa untuk mencapai tesis ini, banyak saran, bantuan, dukungan, dan kemudahan datang dari banyak sumber dari persiapan tesis hingga penulisan artikel ini. Terima kasih yang tulus disampaikan oleh penulis untuk:

1. Dr. Merry Christie Natalie Rumagit, S.E, M.E selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Manado.
2. Dr. Stanny Sicilia Rawung, SE, MM yaitu Dosen Pembimbing I yang telah memberikan perhatian, bimbingan, pengetahuan dan pengarahan.
3. Bobby Hamenda, SE, M.Si, GDiplntDevEc, MIntDevEc. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan pengertian, bimbingan, pengetahuan dan pengarahan.
4. Setiap orang yang telah menawarkan keahlian, arahan, dan kemudahan dari fakultas dan staf Jurusan Ekonomi Universitas Negeri Manado.
5. Semua yang terlibat yang berkontribusi tetapi yang tidak dapat semuanya disebutkan namanya secara individual.

Masih ada kesalahan dan kekurangan dalam proses penulisan tesis hingga posting ini, sehingga penulis menyambut setiap kritik dan rekomendasi konstruktif yang akan meningkatkan proses penulisan tesis dan bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Terima kasih.

Daftar Pustaka

- Anwar, M. L., Palar, S. W. & Sumual, J. I., 2016. Pengaruh DAU, DAK, PAD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan (Kota Manado Tahun 2001-2013). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(02), pp. 218-232.
- Ardiansyah & Widiyaningsih, V. A., 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Simposium Nasional Akuntansi XVII. Mataram*.
- Arina, M. M., Koleangan, R. A. & Engka, D. S., 2019. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 20(3).
- Dewi, N. W. R. & Suputra, I. D. G. D., 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3), pp. 1745-1773.
- Ghozali, I., 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A., 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah..* Jakarta: Salemba Empat.
- Jannah, K. & Nasir, M., 2018. Analisis Pengaruh PAD, DAK, dan DAU Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 3(2).
- Jaya, I. P. N. P. K. & Dwiandra, A. N. B., 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai varabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 7 (1), pp. 79-92.
- Nisa, A. A., 2017. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Volume 1, pp. 203-214.
- Purwanti, D. A., Kawulur, A. F. & Rawung, S. S., 2022. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bolaan Mongondow (Studi Di Dinas Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow). *Jurnal Equilibrium*, 3(1), pp. 80-85.
- Putri, Z. E., 2015. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 5(2).
- Rumagit, M. C. N. & Rawung, S. S., 2021. Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Propinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Equilibrium*, 1(2), pp. 1-14.
- Saputera, A. G. E. & Pandoyo, 2020. Pengaruh DAU, PAD, DAK Terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi pada Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Ekbank*, 3(2), p. 17.
- Siagian, E., 2018. Pengaruh PAD, DAU, DAK terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2010-2016. *Kajian Ilmu Akuntansi*, 6(8).

- Sinaga, J. A., Purba, E. & Panjaitan, P. D., 2020. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2(1).
- Sisilia, M. & Harsono, H., 2021. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Malang Tahun 2010-2019. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 2(1).
- Sukirno, S., 2010. *Makroekonomi. Teori Pengantar*. 3rd ed. Jakarta: PT. Raja Grasindo Perseda.
- Supriyanto, M. C. N. R. 2022. Overlay Analysis of Potential Economic Sectors of Minahasa Regency in 2017-2021. *Journal of International Conference Proceedings (JICP)* Vol. 5, No. 2, pp. 489-498.
- Suwandika, P. E. & Yasa, I. N. M., 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 4(7), pp. 794-810.
- Tambunan, T., 2006. *Iklim Investasi Di Indonesia, Tantangan Dan Potensi*. Jakarta: Kadin-Indonesia-Jetro.
- Wooldridge, J. M., 2013. *Introductory Econometrics: A Modern Approach*. 5th ed. USA: South Western, Mason.